1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

   Provinsi Sulawesi Tengah pada triwulan laporan mengalami peningkatan tekanan inflasi namun terkendali dalam target inflasi nasional 3,00 ± 1% (yoy). Inflasi tahunan Sulawesi Tengah pada triwulan I 2022 sebesar 3,33% (yoy), meningkat apabila dibandingkan dengan triwulan IV 2021 2,20% (yoy) dan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 2,31% (yoy). Secara kumulatif, inflasi tahunan berjalan 1,66% (ytd) lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 0,56% (ytd). Secara umum, Inflasi Sulawesi Tengah masih menunjukkan tren meningkat dalam tiga tahun terakhir, tercermin dari indeks harga komoditas yang terus mengalami peningkatan. Selain itu, hal ini mengindikasikan perbaikan mobilitas dan peningkatan konsumsi masyarakat pada periode laporan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari sisi eksternal, invasi Rusia ke Ukraina memberikan tekanan pada komoditas global, khususnya komoditas di sektor energi dan pangan, yang berdampak pada kenaikan harga di dalam negeri baik terhadap komoditas langsung maupun produk turunannya.
   IHK gabungan 2 kota inflasi di Sulteng tercatat sebesar 1,08% (mtm) atau secara tahunan mengalami inflasi 3,3% (yoy). Berdasarkan posisi terakhir bulan Maret 2022, beberapa komoditas yang mempunyai andil yang besar terhadap inflasi diantaranya:
   a. Bahan Bakar Rumah Tangga (0,20%)
   b. Komoditas Ikan Cakalang (0,09%)
   c. Minyak Goreng (0,09%)

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

   Tekanan inflasi tahunan pada di triwulan laporan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan tekanan inflasi dari triwulan sebelumnya. Di sisi penawaran tekanan dirasakan pada komoditas minyak goreng, bahan bakar non subsidi baik untuk rumah tangga (LPG) maupun untuk transportasi, dan beberapa komoditas inti seperti sewa kontrak rumah dan pasir. Sedangkan dari sisi permintaan, optimism konsumen yang stabil dalam zona optimis didorong oleh capaianpercepatan vaksinasi, termasuk vaksin penguat, yang bermuara terhadap pelonggaran aktifitas masyarakat.
   Pada triwulan laporan, peningkatan tekanan inflasi dari faktor penawaran terutama terjadi pada komoditas administerd price seperti bahan bakar rumah tangga dan core inflation seperti kontrak rumah, tukang bukan mandor dan bahan bangunan seperti pasir. Kelompok komoditas administered price mengalami inflasi tertinggi yaitu sebesar 7,84% (yoy) dan diikuti core inflation sebesar 3.24% (yoy). Tingginya harga acuan global komoditas energy, dimana harga minyak mentah sempat mencapai harga tertinggi semenjak pandemic yaitu US$130/barrel, memaksa Pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan bakar tranportasi non subsidi serta harga bahan bakar rumah tangga (LPG). Harga bahan bakar yang menyesuaikan harga keekonomisan menyebabkan terjadinya disparitas harga dengan komoditas bersubsidi menyebabkan kelangkaan di beberapa daerah dan berujung pada gangguan distribusi barang dan jasa. Sementara itu, peningkatan sewa dan kontrak rumah salah satunya disebabkan oleh kembali meningkatnya mobilitas masyarakat seperti kegiatan belajar mengajar khususnya di level pendidikan menengah dan tinggi yang kembali dilakukan secara pertemuan fisik.Peningkatan optimisme penanganan pandemi juga berdampak terhadap peningkatan tarif tukang bukan mandor dan harga pasir akibat tingginya aktivitas konstruksi di Provinsi Sulawesi Tengah. Di sisi lain, komoditas volatile food pada triwulan I 2022 mengalami deflasi, dipicu oleh membaiknya hasil tangkapan ikan dan sempat terkendalinya harga komoditas minyak goreng.
   Tekanan inflasi dari faktor permintaan tercermin dari optimisme konsumen yang tinggi. Rata-rata Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) triwulan laporan tercatat 129,28, sedikit menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 130,56. Semakin membaiknya perekonomian global dan nasional yang berdampak pada peningkatan harga produk komoditas pertanian Sulawesi Tengah, peningkatan UMP provinsi dan terus meningkatnya tingkat vaksinasi Covid-19 di Sulawesi Tengah, mendorong peningkatan aktivitas warga yang tercermin dari google mobility index. Realisasi bantuan langsung dan tidak langsung dalam penanganan Covid-19 juga berkontribusi dalam menjaga tingkat daya beli masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat menengah ke bawah.
   a. Bahan Bakar Rumah Tangga
   Bahan bakar rumah tangga mengalami penyesuaian harga seiring dengan kenaikan harga LPG Non Subsidi yang dipengaruhi oleh meningkatnya harga minyak dan gas dunia. Eskalasi perang Rusia Ukraina menjadi salah satu faktor utama meningkatnya harga kedua komoditas tersebut yang berujung Pertamina menyesuaikan harga LPG non subsidi di triwulan I 2022.
   b. Komoditas Ikan Cakalang
   Tekanan pada komoditas ikan cakalang secara umum berasal dari sisi produksi dan disparitas harga. Pada triwulan I, produksi ikan tangkap lebih terbatas seiring terhambat faktor cuaca yang mengganggu aktivitas penangkapan. Selain itu, faktor disparitas harga dimana provinsi terdekat Sulteng seperti Kaltim mendorong penjualan ke luar daerah yang menyebabkan pasokan di Sulteng berkurang sehingga mendorong kenaikan harga.
   c. Minyak Goreng
   Kenaikan harga minyak goreng terjadi seiring dengan penyesuaian harga minyak goreng sesuai dengan nilai keekonomiannya. Pada triwulan I 2022, harga CPO mengalami lonjakan tajam seiring dengan perang Rusia Ukraina mempengaruhi harga produk turunannya diantaranya minyak goreng.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program pengendalian harga melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik tingkat provinsi maupun kabuten dan kota. Beberapa hal yang telah dilakukan TPID selama triwulan I 2022 antara lain :
a. Pelaksanaan High Level Meeting TPID Provinsi Sulteng pada 12 Januari 2022 diikuti oleh seluruh OPD terkait di Provinsi Sulteng serta TPID Kabupaten/Kota dan pelaksanaan Workshop penyusunan dan penetapan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Sulawesi Tengah 2022-2024 pada 14 Januari 2022 yang melibatkan OPD dan instansi terkait di Sulawesi Tengah. Hasil pembahasan di tingkat provinsi kemudian diturunkan kepada masing-masing Kabupaten/Kota untuk memperoleh umpan balik yang lebih detail.
b. Pelaksanaan Sekolah Lapang budidaya padi metode hazton oleh Bank Indonesia pada beberapa klaster pertanian padi di Parigi Moutong pada 16 Februari 2022 dalam rangka peningkatan produksi bahan pangan beras serta pemantauan ketersediaan pasokan secara berkelanjutan oleh OPD terkait yaitu Disperindag antara lain di Palu, Parigi Moutong, Banggai Laut.
c. Penyelenggaraan Pasar Murah pada tanggal 10-11 Februari 2022 di Pasar Inpres Manonda, Palu dengan PIC pelaksana Bulog Sulteng untuk menyediakan beberapa komoditas strategis kepada masyarakat serta penyelenggaraan Pasar Murah di Kabupaten Banggai, Morowali, Morowali Utara dan Kabupaten Sigi serta Kota Palu oleh Disperindag dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tengah
d. Komunikasi melalui media komunikasi cetak maupun digital guna memberikan informasi terkait dengan ketersediaan pasokan.
e. Pelaksanaan Rakorda TPID Provinsi Sulteng Pada 21 Maret 2022 diikuti OPD terkait dan TPID Kabupaten/Kota d.r menjaga ketersediaan stok bahan pangan dan isu strategis menjelang bulan suci ramadan dan hari raya idul fitri 1443 H
f. Pelaksanaan Rakorda TPID Kota Palu Pada 30 Maret 2022 diikuti OPD terkait dan TPID Kabupaten/Kota d.r menjaga ketersediaan stok bahan pangan dan isu strategis menjelang bulan suci ramadan dan hari raya idul fitri 1443 H. Beberapa kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut dari rapat tersebut antara lain:
1. Pelaksanaan komunikasi efektif untuk pengelolaan ekspetasi masayarakat agar tidak melakukan panic buying melalui pelaksanaan forum dengan wartawan.
2. Berkoordinasi dengan pertamina dalam pendistribusian BBM, himbauan peran aktif pertamina dalam pendistribusian BBM tepat waktu dan tepa jumlah.
4. Pelaksanaan Pasar Murah dan Pasar Ramadan untuk menjaga stabilitasi harga
5. Pelasakanaan Pasar Lentora dan Kerjasama Berasa ASN untuk menjaga kestabilan harga
g. Tindak lanjut pembahasan inisiasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) Sulteng-Sulut dan pelaksanaan komunikasi dan pertemuan dengan wartawan terkait dengan ketersediaan pasokan, khususnya minyak goreng serta komoditas lainnya dan himbauan untuk mengantisipasi adanya panic buying oleh masyarakat akibat informasi asimetris terkait adanya kelangkaan pasokan
1. Pelaksanaan High Level Meeting TPID Provinsi Sulteng pada 12 Januari 2022 diikuti oleh seluruh OPD terkait di Provinsi Sulteng serta TPID Kabupaten/Kota dan pelaksanaan workshop penyusunan dan penetapan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Sulawesi Tengah 2022-2024 pada 14 Januari 2022 yang melibatkan OPD dan instansi terkait di Sulawesi Tengah.
2. Penyelenggaraan Pasar Murah pada tanggal 10-11 Februari 2022 di Kota Palu (Pasar Inpres Manonda), Banggai, Morowali, Morowali Utara, dan Sigi.
3. Komunikasi melalui media komunikasi cetak maupun digital guna memberikan informasi terkait dengan ketersediaan pasokan.
4. Berkoordinasi dengan pertamina dalam pendistribusian BBM, himbauan peran aktif pertamina dalam pendistribusian BBM tepat waktu dan tepat jumlah.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

   1. Melalui pelaksanaan High Level Meeting TPID, terjadi sinkronisasi berbagai kebijakan pengendalian inflasi daerah.
   2. Pelaksanaan pasar Murah di Kota Palu (Pasar Inpres Manonda), Banggai, Morowali, Morowali Utara, dan Sigi memberikan akses bagi keterjangkauan harga terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
   3. Dengan komunikasi melalui media komunikasi cetak maupun digital, masyarakat dapat lebih tenang dan panic buying dapat diminimalisir.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

   1. Pelaksanaan pasar murah dengan tujuan mengintervensi harga perlu dilakukan secara lebih terarah dengan menargetkan pelaku usaha. Pelaksanaan pasar murah masih berfokus pada keterjangkauan harga yang lebih mengarah pada bantuan sosial.
   2. Kebijakan penyediaan BBM melibatkan stakeholders yang lebih luas. Diperlukan optimalisasi distribusi dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti aparat keamanan sehingga distribusi BBM tepat sasaran.